



---

## Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jepara 2017)

Andre Anggriawan<sup>1)</sup>, Subadriyah<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara<sup>1) 2)</sup>  
131120001182@unisnu.ac.id<sup>1)</sup>, subadriyah@unisnu.ac.id<sup>2)</sup>

---

### Abstract

*This research aims to test internal supervision conducted by the government, test the implementation of the Regional Accounting Financial System and test regional financial management that affects government performance in Jepara regency. This type of research is qualitative causal research. The population of this study is all OPD in Jepara Regency which amounted to 119 OPD. The sample was calculated with the Slovin technique so that 54 OPDs were obtained or about 54% of the total number of OPDs in Jepara Regency. The method of collecting data by conducting a survey directly spreads closed questionnaires. Data analysis method using multiple linear regression analysis. The results showed that (a) internal supervision has a significant effect on Government Performance, (b) Implementation of Regional Financial Accounting System has a significant effect on Government Performance, (c) Regional Financial Management has a significant effect on Government Performance, and (e) simultaneous internal supervision, implementation of regional financial accounting system, regional financial management on government performance.*

**Keywords:** Government Performance , Internal Supervision, Implementation of Regional Financial Accounting System, Regional Financial Management

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengawasan Internal yang dilakukan pemerintah, menguji pelaksanaan Sistem Keuangan Akuntansi Daerah dan menguji Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Jepara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jepara yang berjumlah 119 OPD. Sampel dihitung dengan teknik Slovin sehingga diperoleh 54 OPD atau sekitar 54% dari jumlah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jepara. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan survei secara langsung menyebar kuesioner tertutup. Metode analisis data menggunakan Analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah, (b) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah, (c) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah, dan (e) secara simultan Pengawasan Internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah.*

**Kata Kunci:** Kinerja Pemerintah, Pengawasan Internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

Corresponding author:

Subadriyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

subadriyah@unisnu.ac.id

## PENDAHULUAN

Di penghujung tahun 2017, tepatnya pada bulan Oktober 2017 pemerintah Daerah Jepara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda). Dalam kegiatan larwasda tersebut pemerintah berharap dapat menyatukan komitmen dan menerapkan prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Dalam kegiatan tersebut pemerintah juga menyampaikan bahwa sekarang ini terjadi perubahan paradigma pengawasan yang lebih menitikberatkan pada preventif dengan perannya sebagai konsultan dan katalis, maka dari itu pemerintah mengharuskan untuk sinergi dan bekerja sama antara inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jepara sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sebenarnya rencana mewujudkan *Good Governance* di daerah Jepara ini sudah disepakati pada tahun 2009, kala itu Bupati Jepara dan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemabangunan (BPKP ) Jateng, menandatangani kesepakatan bersama tentang Peningkatan Pengelolaan Manajemen Pemerintah Daerah. Namun nyatanya sampai pada pilbup 2017 terdapat beberapa catatan kasus akibat dari tidak sinkronnya pemerintahan Kabupaten Jepara. Antar lain Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum rampung tuntas, Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat rendah/lambat, banyak Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) belum jadi Peraturan Daerah (perda), banyak kunjungan kerja dan perjalanan dinas tanpa jelas perolehan manfaatnya (Rapor DPRD Periode 2014 - 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah belumlah berjalan secara maksimal. Menurut Irvan (dalam Hidayat, 2015) mengungkapkan bahwa Kinerja telah menjadi sebuah gambaran atas tingkat pencapaian pelaksanaan dari suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebuah organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan organisasi. Untuk mencapai suatu kinerja yang baik, tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja daerah. Menurut Sukmana., Wawan., Anggasari., (2009) menyatakan bahwa dilaksanakannya pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan yang baik dapat menggambarkan sebagaimana kinerja Pemerintah daerah untuk menunjukkan hasil yang dicapai selama periode tertentu. Biasanya Bawasda ini bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Rohman, 2009).

Menurut Sukmana., Wawan., Anggasari., (2009) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik tidak hanya memverifikasi sebuah transaksi-transaksi agar dapat dilakukan penelusuran dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana, tapi juga sistem akuntansi keuangan daerah tersebut dapat mendukung terhadap pencapaian kinerja. Sedangkan menurut Iriyansyah (dalam Sukmana., Wawan., Anggasari., 2009) beranggapan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah baik oleh pengawasan fungsional maupun DPRD pada prinsipnya akan terhindar dari banyak hambatan apabila sistem akuntansi yang diterapkan sudah baik.

Menurut Abdul (dalam Hidayat, 2015) menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Rohman (2009) menyatakan bahwa terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan sebuah tuntutan pada setiap Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk bisa mencapai kinerja yang optimal dalam pengelolaan berbagai sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah. Untuk mencapai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik, maka pemerintah harus berupaya terus melakukan berbagai usaha dengan meningkatkannya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Rohman, 2009).

Menurut Halim (dalam Rohman, 2009) menyatakan bahwa indikasi keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dengan terpenuhinya norma umum anggaran daerah, dengan begitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin menjadi baik, selain itu juga kehidupan demokrasi akan semakin maju, terwujudnya keadilan dan pemerataan, serta adanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sama-sama berpengaruh

positif terhadap Kinerja Pemerintah. Sedangkan dalam penelitian Ratnawati, Jul dan Petrus, (2011) memperoleh hasil bahwa Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern sama-sama terdapat pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Begitu pula hasil penelitian Sukmana., Wawan., Anggasari., (2009) menunjukkan bahwa total Pengaruh Pengawasan Intern, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan pengaruh secara simultan antara variabel Pengawasan Intern, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 97,8%. Sedangkan faktor residu yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam penelitian tersebut adalah sebesar 2,2%. Hasil tersebut memberikan makna bahwa selain Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, masih ada variabel penting yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.

Dari uraian deskripsi latar belakang ini, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian mengenai sejauh manakah pengaruh pengawasan intern, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pemerintah, serta pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan begitu penulis tertarik melakukan penelitian empiris dengan judul : “Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus di Kabupaten Jepara 2017)”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Sukmana., Wawan., Anggasari., (2009) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan ”bagaimana dan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan urusan-urusannya tersebut”. Menurut Tangkilisan (dalam Sukmana dan Lia, 2009) mengatakan bahwa ada tiga konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu Responsiveness, Responsibility, Accountability. Menurut Ratnawati, Jul dan Petrus (2011) mengemukakan bahwa sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun non financial. Kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Sabeni dan Imam (dalam Sukmana dan Lia, 2009) mengartikan bahwa Pengawasan Intern merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pengawasan secara umum dirumuskan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mengamati dan menilai terkait dengan suatu kegiatan tertentu. Pengendalian Intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus guna mengamati kinerja pegawai instansi untuk menciptakan suatu kinerja organisasi pemerintah yang baik dimana kegiatan ini dikoordinasi oleh pejabat yang berwenang untuk mendorong atau memotivasi anggota pegawai instansi yang lain. Pengawasan ini nantinya akan menjadikan kinerja pemerintah lebih efektif dan efisien. Menurut Bastian (2006) menyatakan ada beberapa unsur pengendalian internal. Adapun unsur-unsurnya adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas; sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya; praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi; karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Untuk dapat dihasilkannya suatu laporan keuangan yang handal, relevan, dan dapat dipercaya, maka pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal pula. Sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internnya juga lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang lemah tersebut menjadi kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004). Sistem akuntansi

keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain yang tersusun secara sistematis guna untuk melakukan analisis transaksi sampai penyusunan laporan keuangan yang terjadi di lingkungan pemerintah. (Haryanto, Slamet Soesanto, 2021)

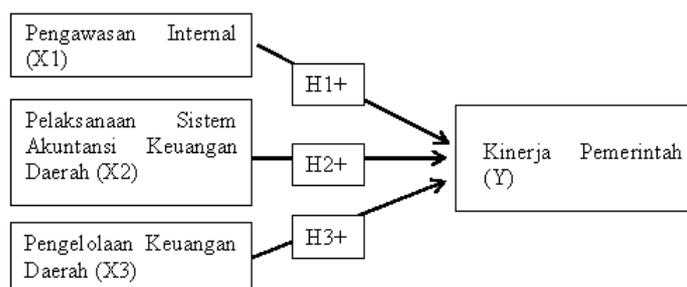
Sedangkan menurut Rohman (2009) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting transaksi pengelolaan keuangan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran – ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, dimana bisa diperiksa segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah.

Pencatatan dan pelaporan itu nantinya diperlukan untuk memenuhi tiga kebutuhan yakni legal, managerial, dan stewardship. Kaitannya dengan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern yang dijalankan secara tertib dan efisien akan berdampak pada sistem keuangan akuntansi daerah yang diterapkan akan berjalan dengan baik pula. Untuk itu agar tidak terjadi tindakan yang menyimpang, disamping adanya wewenang keleluasaan yang besar, maka perlu diciptakan suatu pengawasan intern yang ketat.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penyusunan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi pemerintah yang belum memiliki DPRD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap keuangan daerah, serta keuangan BLUD.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya, yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pedoman-pedoman dalam pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan untuk menjamin bahwa pelimpahan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah tercapai tujuannya (Bawono, Icku Rangga, Mochamad Noveisyah, 2006).

Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen yang bertumpu pada dua dimensi penting, yaitu : perencanaan dan pengendalian (Halim, 2004).



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung atau tidak melalui perantara dengan cara menyebar kuesioner ke kepala kantor dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan independen.

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah.

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengawasan Internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jepara yang berjumlah 119 OPD. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan menggunakan teknik Slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 54 OPD atau sekitar 54% dari jumlah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Probability Sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan survei secara langsung menyebarkan kuesioner tertutup, artinya kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini diantarkan secara langsung ke alamat Kantor masing-masing OPD yang ditunjukkan kepada Kepala kantor masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Jepara.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi linear berganda, yaitu “hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ )”. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya serta berapa besar pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya. Adapun alat analisis statistik ini menggunakan pada regresi linier berganda (*multiple linier regression*) dengan bantuan *software statistik* SPSS versi 18. Penggunaan alat ini digunakan supaya peneliti dapat mengetahui hubungan antar variabel dependen dan independen yang sudah peneliti tentukan.

Analisis regresi pada dasarnya merupakan studi mengenai ketergantungan dari variabel terikat dengan salah satu atau lebih variabel-variabel independen (variabel penjelas/bebas), yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui (Ghozali, 2013). Untuk regresi dalam sebuah penelitian yang variabel bebasnya terdiri atas dua ataupun lebih regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel bebas diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda.

## HASIL

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kualitas kuisisioner yang digunakan sebagai instrumen suatu penelitian atau digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu kuisisioner. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, untuk  $df = n-2$ . Dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 54. Sehingga dapat dihitung  $df = n-2 = 54-2 = 52$ , untuk  $\alpha = 0,05$ . Sehingga dapat diketahui  $r$  tabelnya sebesar 0.268.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
pengawasan internal	X1.1	0.273	0.2681	Valid
	X1.2	0.394	0.2681	Valid
	X1.3	0.413	0.2681	Valid
	X1.4	0.375	0.2681	Valid
	X1.5	0.279	0.2681	Valid
	X1.6	0.333	0.2681	Valid
	X1.7	0.373	0.2681	Valid
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X2.1	0.372	0.2681	Valid
	X2.2	0.276	0.2681	Valid
	X2.3	0.372	0.2681	Valid

	X2.4	0.283	0.2681	Valid
	X2.5	0.475	0.2681	Valid
	X2.6	0.283	0.2681	Valid
Pengelolaan	X3.1	0.686	0.2681	Valid
Keuangan Daerah	X3.2	0.574	0.2681	Valid
	X3.3	0.509	0.2681	Valid
	X3.4	0.429	0.2681	Valid
	X3.5	0.597	0.2681	Valid
	X3.6	0.724	0.2681	Valid
	X3.7	0.611	0.2681	Valid
Kinerja Pemerintah	Y.1	0.312	0.2681	Valid
	Y.2	0.543	0.2681	Valid
	Y.3	0.616	0.2681	Valid
	Y.4	0.629	0.2681	Valid
	Y.5	0.514	0.2681	Valid
	Y.6	0.490	0.2681	Valid
	Y.7	0.270	0.2681	Valid
	Y.8	0.374	0.2681	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing item yang digunakan untuk menyusun masing-masing kuisioner memiliki  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu 0.2681. Hal ini berarti bahwa masing-masing item indikator adalah valid sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas ini yaitu untuk mengetahui kehandalan alat ukur yang digunakan. Untuk melihat handal atau tidaknya kuisioner maka digunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$  maka variabel tersebut dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standar	Keterangan
Pengawasan internal (X1)	0.779	0.6	Reliabel
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0.794	0.6	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	0.813	0.6	Reliabel
Kinerja Pemerintah (Y)	0.760	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	N	Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	54	0.420	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,420. Hal ini berarti nilai tersebut lebih dari 0,05. Sehingga data berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan untuk penelitian.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui terdapat tidaknya korelasi antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dan *Tolerance*. Asumsinya jika nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1, maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

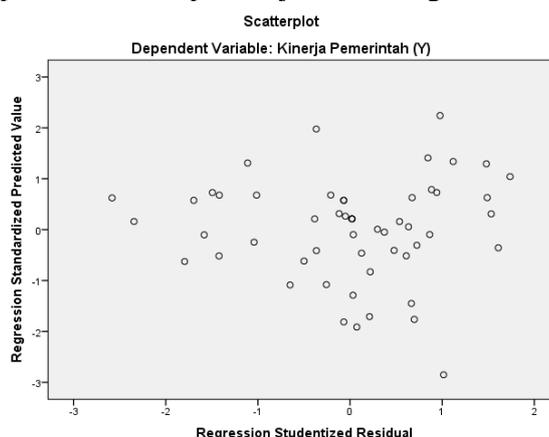
Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengawasan internal (X1)	0.991	1.009
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0.527	1.896
Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	0.524	1.908

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,1, dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pola yang jelas seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit. Titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Hasil Regresi Berganda**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,717	5,155		,915	,365
1 pengawasan internal (X1)	,169	,143	,098	3,177	,005
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	,695	,188	,424	3,703	,001
Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	,522	,132	,456	3,966	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,169X_1 + 0,695X_2 + 0,522X_3$$

Berdasarkan koefisien regresi masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  $\beta_1 = 0,169$ , menunjukkan variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y dengan koefisien regresi sebesar 0,169. Hal ini menunjukkan jika pengawasan internal meningkat maka kinerja pemerintah akan meningkat.  $\beta_2 = 0,695$ , menunjukkan variabel X2 berpengaruh positif terhadap Y dengan koefisien regresi sebesar 0,695. Hal ini menunjukkan jika Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat maka kinerja pemerintah akan meningkat.  $\beta_3 = 0,522$ , menunjukkan variabel X3 berpengaruh positif terhadap Y dengan koefisien regresi sebesar 0,522. Hal ini menunjukkan jika Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat maka Kinerja Pemerintah akan meningkat.

### Uji t (Uji Parsial)

Uji t (uji parsial) ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ), terhadap variabel (Y). Hasil perhitungan  $t_{hitung}$  dengan bantuan program SPSS 20 ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients				
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,717	5,155		,915	,365
1 pengawasan internal (X1)	,169	,143	,098	3,177	,005

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	,695	,188	,424	3,703	,001
Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)	,522	,132	,456	3,966	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

Sumber : Data Primer yang diolah.

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel X1 sebesar 3,177. Untuk mengetahui  $t_{tabel}$  dari variabel X1 maka dapat dicari dengan rumus  $df = n - k$ . Dimana n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05. Jadi  $df = n - k = 54 - 4 = 50$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1.298. Dengan demikian  $t_{hitung} (3,177) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) sebesar 3.703. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05, maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1.298. Dengan demikian  $t_{hitung} (3,703) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel pelatihan sebesar 3,966. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1.298. Dengan demikian  $t_{hitung} (3,966) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### Uji F (Uji Simultan)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel variabel ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ), secara simultan terhadap (Y). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh uji F sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji F**

Model	ANOVA <sup>a</sup>				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	594,742	3	198,247	31,455	,000 <sup>b</sup>
Residual	315,129	50	6,303		
Total	909,870	53			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X3), pengawasan internal (X1), Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 31,455. Untuk mengetahui  $F_{tabel}$  dapat dicari dengan  $df1 = k - 1$ ,  $df2 = n - k$ . Dengan sampel (n) = 54 maka dapat dihitung  $df1 = 4 - 1 = 3$ ,  $df2 = 54 - 4 = 50$ ,  $\alpha = 0,05$ . Sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,79. Dengan demikian  $F_{hitung} (31,455) > F_{tabel} (2,79)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Sistem Keuangan Akuntansi Daerah serta Pengelolaan Keuangannya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah.

### Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh atau tingkat kepercayaan terhadap variabel yang dihitung atau untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen. Hasil output SPSS dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 8. Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,808 <sup>a</sup>	,654	,633	2,510

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X3), pengawasan internal (X1), Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah.

Berdasarkan Tabel 8 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,633, dalam hal ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari pengawasan internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 63,3%, sedangkan sisanya 36,7% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam model regresi.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,169. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian statistik t yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} (3,177) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka  $H_0$  ditolak sehingga pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_1$  diterima.

Pengawasan internal adalah sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar kegiatan dengan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, menentukan, serta mengukur pertimpangan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan dilakukan pada semua tingkatan manajemen. Para pemimpin tingkat atas pengawasan dilakukan pada seluruh bagian atau unit pemerintah. Sedang pada tingkat menengah dan bawah, pengawasan dilakukan pada unit pimpinannya masing-masing.

Pengawasan internal harus memonitor semua program dan kegiatan operasional Pemerintah. Pengawasan internal dituntut untuk lebih giat lagi melakukan koreksi atas penyimpangan dari kinerja yang diinginkan. Sehingga kinerja pemerintah akan semakin baik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Sukmana dan Lia (2009) menyatakan bahwa secara parsial Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan Ratnawati dan Petrus (2011) menyebutkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah

### Pengaruh Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai

koefisien regresi sebesar 0,695 dan uji statistik  $t$  yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} (3.703) > t_{tabel} (1.298)$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka  $H_0$  ditolak sehingga Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Dari perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, oleh karena itu sistem akuntansi keuangan daerah diupayakan untuk terus berjalan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmana dan Lia (2009) menyatakan bahwa Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Demikian pula Hidayat (2015) menyebutkan juga bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

### **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah**

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari koefisien regresi sebesar 0,522 dan hasil uji statistik  $t$  yang menunjukkan  $t_{hitung} (3,966) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka  $H_0$  ditolak sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima.

Pengelolaan keuangan yang berorientasi kepada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja. akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggaraan pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja. semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2015) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Pengawasan Internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Kinerja Pemerintah**

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara simultan Pengawasan Internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik  $F$  yang menunjukkan bahwa  $F_{hitung} (31,455) > F_{tabel} (2,79)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima.

Kinerja pemerintah adalah suatu prestasi dan serangkaian proses kegiatan dalam penyelenggaraan tercapainya tujuan organisasi yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Dimana dalam pengukuran kinerja terdapat dua informasi yang baik dijadikan sebagai acuan yakni informasi financial dan informasi nonfinancial. Dilaksanakannya Pengawasan Intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik tidak hanya memverifikasi sebuah transaksi-transaksi agar dapat dilakukan penelusuran dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana, tapi juga sistem akuntansi keuangan daerah tersebut dapat mendukung terhadap pencapaian kinerja.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,169. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian statistik t yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} (3,177) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$ . Pengawasan internal harus memonitor semua program dan kegiatan operasional Pemerintah. Pengawasan internal dituntut untuk lebih giat lagi melakukan koreksi atas penyimpangan dari kinerja yang diinginkan. Sehingga kinerja pemerintah akan semakin baik. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,695 dan uji statistik t yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} (3,703) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah. Secara parsial Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari koefisien regresi sebesar 0,522 dan hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung} (3,966) > t_{tabel} (1,298)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pengawasan Internal, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik F yang menunjukkan bahwa  $F_{hitung} (31,455) > F_{tabel} (2,79)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Adapun saran yang dapat diberikan bagi instansi yaitu agar lebih sering melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Diharapkan pada setiap Dinas di Kota Jepara dapat melaksanakan pengawasan internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada dan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel independen yang terkait dengan kinerja pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Bawono, Icut Ranga, Mochamad Noveisyah, A. L. (2006). Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Reguler dan Non Reguler Tentang Pendidikan Profesi Akuntan. *JAAI*, 10(2), 185–193.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryanto, Slamet Soesanto, Z. (2021). Analisis sistem akuntansi pengelolaan uang perjalanan dinas di inspektorat iv itjen kemendikbudristek ri. 02, 25–37.
- Hidayat, R. (2015). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Ratnawati, Jul dan Petrus, A. C. W. 2011. (2011). Peran Manajerial Pengelo la Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Dian*, 11(2), 182–191.
- Rohman, A. (2009). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi

Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Arikounto Suharsimi, 1(2)*.

Sukmana., Wawan., Anggasari., L. (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.